

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Inflasi di Kabupaten Murung Raya relatif terkendali, sejalan dengan tren nasional. Pemerintah Daerah aktif mengikuti Rakor Inflasi Nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga stabilitas harga.

Barang kebutuhan pokok dan penting yaitu :

Beras : harga cenderung stabil, namun tetap menjadi perhatian utama karena kontribusinya terhadap inflasi.

Gula, minyak goreng, telur : harga fluktuatif, dipengaruhi oleh distribusi dan pasokan regional.

Cabai dan bawang merah : Komoditas ini masih rentan terhadap gejolak harga akibat cuaca dan distribusi.

Analisis Risiko Inflasi ke Depan :

Cuaca Ekstrem, distribusi dan logistik : ketergantungan pada jalur darat dan kondisi infrastruktur dapat memicu keterlambatan pasokan.

Konsumsi menjelang akhir tahun : kenaikan permintaan menjelang natal dan tahun baru berpotensi mendorong harga naik.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

1. Kabupaten Murung Raya belum memiliki ketahanan pangan yang kuat secara lokal.
2. Banyak komoditas kebutuhan pokok seperti beras, cabai, bawang dan telur masih dipasok dari daerah lain misalnya Banjarmasin, Palangka Raya atau Jawa.
3. Ketergantungan ini membuat harga sangat rentan terhadap gangguan distribusi dan cuaca.
4. Kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah pedalaman menyulitkan distribusi barang.
5. Jalan penghubung antar kecamatan belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kelancaran logistik.
6. Biaya angkut tinggi menyebabkan disparitas harga antar wilayah dalam kabupaten.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pemerintah Kabupaten Murung Raya secara rutin mengikuti Rapat Koordinasi Inflasi Mingguan yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
2. Arahan pusat seperti 4K (Ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif).
3. TPID Kabupaten Murung Raya telah dibentuk dan mulai menjalankan fungsi koordinatif lintas OPD
4. Dinas Perindagkop dan Dinas Ketahanan Pangan melakukan pemantauan harga mingguan di pasar-pasar utama.
5. Data harga dikompilasi dan dilaporkan ke pusat melalui sistem e-monitoring Kemendagri dan BPS.

Pemerintah Kabupaten Murung Raya bekerja sama dengan Bulog dan distributor lokal

6.

untuk melaksanakan operasi pasar saat terjadi lonjakan harga.

7. Kegiatan pasar murah dilakukan menjelang hari besar keagamaan atau saat harga pangan melonjak.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Koordinasi lintas OPD mulai berjalan, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Pemantauan harga dilakukan rutin oleh Dinas UKM Perindagkop dan Dinas Ketahanan Pangan namun data harga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pusat (BI, BPS, Kemendagri), ketersediaan pasokan pangan strategis masih bergantung pada daerah luar dan biaya logistik tinggi akibat keterbatasan infrastruktur jalan dan transportasi maka terjadi disparitas harga antar kecamatan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Penguatan Koordinasi TPID Kabupaten Murung Raya aktifkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara lintas sektor, stabilisasi pasokan dan distribusi indentifikasi komoditas penyumbang inflasi (volatile food) dan pastikan kelancaran distribusinya dan intervensi pasar melalui operasi pasar murah, kerja sama antar daerah dan fasilitas logistik.